

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, (Jakarta: *Kencana Prenada Media group*, 2021), 159
- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*, 2009), h. 36
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: *Kencana*, 2006), h. 20
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 9
- Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta , 2003.
- Aidil Aulya and Ahmad Irfan, "Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 109–27
- Al. Andang L. Binawan, "Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Volume 7 Nomor 2
- Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: *RajaGrafindo Persada*, 2004), 118.
- Andi Saputra, "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam Kristen Ini," dalam <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>
- Anggreini Carolina Palandi, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, ISSN: 2337-4942, Lex Privatum, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, h. 196.
- Annisa Hidayati. Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Volume 5 Nomor 2 Juli 2022, hlm. 30-32
- Ari Sandita Murti, "PN Jaksel Izinkan Pasangan Beda Agama Catatkan Pernikahan ke Dukcapil," dalam <https://metro.sindonews.com/read/884507/170/pn-jaksel-izinkan-pasangan-beda-agama-catatkan-pernikahan-ke-dukcapil-1663106977/>
- Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64
- Aurora & Gunawan, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023", *Unes Law Review*. 2023, hal 2981

- Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50
- Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82
- Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64.
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 9
- Diar Faroha, "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (2022), 50
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 89.
- Ellyvon Pranita, "PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen," dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/03/0642_1981/pn-tangerang-terima-permohonan-register-perkawinan-beda-agama-islam/
- Ermasyanti, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Pranata Hukum : Jakarta Selatan), Vol. 6 Nomor 2, Juli 2011, h. 200
- Fakhrurrazi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138
- Fence M. Wantu, *Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Pelangi Ilmu, Vol. 4, 1 Januari 2011, Yogyakarta, *Pena Persada Desktop and Publishing*, 2011, h.7
- Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed, 2023, *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol, 22 (2) : 118-127
- Hazairin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), h. 25
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Ctk. Ketiga, (Bandung: Mandar Maju), h. 17
- Ika Nurjanah, Oyoh Bariah, and Acep Nurlaili, "Persepsi Dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama Dan Akibatnya," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 9, no. 3 (2022): 240–51.

- Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <https://icrp.business.site/>
- Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Jefry Tarantang, , Siah Khosyiah, “Filosofi ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2023), H. 44-55
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 25 Januari 2024, pukul 14.45 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/determinasi>
- Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 137.
- KBBI Online, pada laman <https://kbbi.lektur.id>, diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 10.34 WIB.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- Kevin Angkouw. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan. Lex Administratum*, Vol. II No. 2, 2014, h.135
- Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”
- Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”; *Gonadi and Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No . 2 Tahun 2023”*; *HR., Hukum Administrasi Negara*, 60
- Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: *Media Sahabat Cendikia*, 2019), h. 24.
- Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21
- Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I wayan Arthanaya, 2021, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Prefensi*, Vol. 2, No. 1, hlm. 17-18

- Makalew, J. Marlen. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Lex Privatum.* 2(1) (2013), h 131-144
- Mappatunru Andi Munafri D., “*The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia,*” *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 150.
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: *Sinar Grafika*, 2015), h.117
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157
- Maryam Laomo Dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi :Lex Privatum*, Vo. Xii, No.2, Juli 2023, H. 4
- Maryam Laomo dkk, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 68/PUU-XII/2014 atas pasal 2 AYAT (1) Undang-Undang No.1 TAHUN 1974, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi : Lex Privatum*, Vo. XII, No.2, Juli 2023, h. 4
- Maulana Rihdo Al Fasil,dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum” Usrah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 no 2 (STAI Muhammadiyah Probolinggo :Oktober 2023)*, hal 231.
- Maulana Rihdo Al Fasil,Dkk, “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*”
- Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 (2) : 361-384
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama(Jakarta: *Gramedia Pustaka Utama*, 2009), 146-149
- Muh Rivai B and Hardian Iskandar, “*Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*” 5, no. 2 (2023): 1449–60
- Muhammad Khambali “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 16
- Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung,” *Zaaken: Journal of Civil Dan Bussiness Law* 4, no. 1 (2023): 1–17.
- Mukti Fajar N. Dan Yuianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 158
- Munir Fuady, 2015. “*Konsep Hukum Perdata*”. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10

Nadzirotus Sintya, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta (2022)

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 225

Noer Yasin, Dkk, "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis A Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", (*Jurnal Penelitian Hukum De Jure : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri*, Desember 2023) Vol.24 No.4 , 389- 402

Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1 (2018), h. 47

Oliver Wendell Holmes dalam Titon Slamet Kurnia, Prediktabilitas Ajudikasi Konstitusional: Mahkamah konstitusi dan Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, Unsur kepastian hukum, Jakarta, Mahkamah Konstitusi*, 2016, h.260

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. *Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini*

Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Patricia Karlina Dimiyati and Rosalinda Elsin Latumahina, "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 138–53

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng

Penetapan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989

Penjelasan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.
Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 57.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*,” *Legislasi Indonesia* 14 (2017):h. 56

Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafai, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 (1) : 117- 136

Rosdiana. Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Disertasi UIN Jakarta 2022, h.163 dikutip dari Kate McCarthy, “*Pluralist Family Values: Domestic Strategies for Living with Religious Difference*” *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol.612 (2007):188-208,193 dalam *Pluralist Family Values: Domestic Strategies for Living with Religious Difference on JSTOR*

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), h. 11

Safira Nafa Khairina, Tri Wahyu Hidayati ,”Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Studi Hukum Islam:Isti'dal*, Vol. 10, No.2, (2023), h.189-204

Sandu Siyoto and M. Ali Sadik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Seno Wibowo Gumbira, 2016, Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.46 (1)

- Sercan Guler, *The Problem of Legal Indeterminacy in Contemporary Legal Philosophy and Lawrence Solum's Approach of the Problem*, (Annales XL, No. 57), 2008, h. 38.
- Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Siti Rahma, Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol.2, No. 02, 2023, h.64
- Sofiya Nuryanti and Muh. Jufri Ahmad, "Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 303–15
- Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), hlm.65
- Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2017), Cet. 1, h. 27
- sshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 393
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberti, 1999, h.145
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- Tengku Rizq Syahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), h. 217.
- Tru Winarni, Akhmad Naridin, dkk. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2023), h. 249
- Tyara Ayu Syaharani & Nurauliya Syifa Khofiyani, "Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga", (*Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Universitas Padjadjaran*) Volume 1, Nomor 7, February 2024, Halaman 35-40
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta:Gama Media,2017) h.150

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Zulfadhli and Muksalmina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6 (2021): 1851–62,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Utami Argawati, *MK tolak permohonan perkawinan beda agama*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 33.

Witanto D.Y, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), h. 142

Zainal Arifin, “*Perkawinan Beda Agama*,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58